

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Oleh:

SELVIANA WENI^{1*}

NIM: E1013161015

Isdairi², Ira Patriani²

*Email: e1013161015@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya Sumberdaya Manusia atau petugas pendamping. Jumlah keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskin sehingga banyak penduduk miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III dalam Agustino (2016:136-141) yang terdiri dari: 1) Komunikasi, transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi kebijakan Program Keluarga Harapan masih kurang, perlu adanya kosisten dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang menerima agar lebih paham tentang PKH. 2) Sumber Daya, Staf atau petugas pendamping PKH masih kurang, hanya berjumlah 1 (satu) orang sehingga pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor belum sesuai harapan. 3) Disposisi, dalam pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor perlu di tingkatkan lagi dalam hal ini insentif bagi pelaksana dilapangan. 4) Struktur Birokrasi, perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu adanya penambahan staf atau petugas pendamping PKH di Desa Hilir Kantor agar pelaksanaan PKH bisa sesuai harapan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan

untuk dikaji secara terus menerus, ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut. Komponen pendidikan

dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat melanjutkan pendidikan keseluruhan dalam rangka untuk melanjutkan pendidikan anak.

Kebijakan Program Keluarga Harapan

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan

bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (basic saving account) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu

Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup

keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

- a. untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Sosial tentang Program Keluarga Harapan;
Tujuan Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Dalam pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor terdapat beberapa masalah dalam implementasinya. Permasalahan yang terjadi di Desa hilir kantor antara lain kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya sumberdaya

manusia dalam pelaksanaan PKH di lapangan akan berdampak pada penyaluran dana seperti terjadinya antrian panjang, berdesak-desakkan yang seharusnya penyaluran dana bisa selesai dalam satu hari, tetapi tidak selesai dalam satu hari membuat masyarakat yang mengantri resah bahkan ada yang marah. Seharusnya banyaknya petugas pendamping menyesuaikan dengan banyaknya masyarakat penerima bantuan, agar pelaksanaan PKH berjalan optimal dilapangan.

Masalah lain juga yang terjadi di Desa hilir kantor adalah Jumlah keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskin , jumlah penduduk miskin 1500 Kepala Keluarga dan jumlah penerima PKH 19 orang, sehingga banyak penduduk miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan, berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH beliau mengatakan bahwa jumlah penerima sudah di tentukan dari tingkat pusat dan setiap daerah sudah masing-masing memiliki kouta penerima bantuan PKH,

jikalau ada penambahan itu pun pusat yang menentukan petugas daerah hanya melaksanakan tugas dan mengikuti aturan.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (Petugas pendamping) Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sehingga penyaluran dana belum berjalan sesuai harapan.
2. Jumlah keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskin sehingga banyak penduduk miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai faktor apa saja yang menyebabkan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang belum berjalan sesuai harapan.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana proses Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya:

Secara Teoritis,

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.

Secara Praktis,

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pembaca dan peneliti dalam penelitian implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hilir

Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Kesimpulannya kebijakan public (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan. Nilai nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan yang sistematis dan dasar dasar pertimbangan program-

program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang tengah dihadapi masyarakat.

Definisi Kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik:

Anderson dalam Wahab (2012:8) menyatakan bahwa kebijakan itu adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.

R. Dye dalam Wibawa (2011:13) Kebijakan Publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.

Carl Freidrich dalam Wahab (2012:9) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan sasaran yang diinginkan.

Proses kebijakan publik itu sendiri menurut Dunn dalam Subarsono (2012:8) mengungkapkan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan

2. Implementasi kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145) “implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Sedangkan menurut Mamanian dan Sabatier dalam Wahab (2005: 145) menegaskan bahwa

“implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005: 63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)”.

Perhatian utama menurut kebijakan Wahab (2005: 63) memfokuskan dari pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005: 64) implementasi akan terfokus pada “tindakan pejabat dan instansi di

lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang *target group*, menurut Wahab (2005: 64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.

Sedangkan Udoji dalam Agustino (2012:140) mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Model yang dikemukakan oleh Edwards III dalam Agustino (2016:136-141) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakandapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan).

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- Transmisi
- Kejelasan informasi
- Konsistensi

b. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya yang berperan serta dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- Staff
- Informasi dalam implementasi kebijakan
- Wewenang
- Fasilitas

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu

kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa.

Hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III adalah:

- Pengangkatan birokrat
- Insentif (*incentives*)

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/energi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau

standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2014: 147), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti.

2. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti didalam melakukan proses penelitian yaitu :

1. Menulis Outline

2. Menulis Usulan Penelitian
3. Review Usulan Penelitian
4. Seminar Usulan Penelitian
5. Perbaikan Naskah Usulan Penelitian
6. Melakukan Penelitian Dan Menulis Skripsi
7. Ujian Skripsi

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan ini yaitu di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Dalam penelitian kualitatif, waktu yang diperlukan dalam penelitian tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan. Waktu penelitian ini dihitung mulai dari pengajuan usulan penelitian pada bulan November 2019 sampai penelitian ini dinyatakan selesai

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive, menurut (Sugiyono 2012, 56) Teknik

purposive adalah penentuan informan diambil dari orang-orang yang banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti, (Sugiyono 2012, 56).

Maka, subjek penelitian merupakan orang-orang terkait sumber data yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisilangsung yang ada, sehingga data yang dihasilkan dapat akurat.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang akan di teliti adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengungkap masalah yang diteliti, maka di perlukan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Pengamatan atau observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mempergunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu,

pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti dan melakukan pencatatan pada saat penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap subyek penelitian. Penelitian dalam hal ini telah mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan tentang apa yang hendak ditanyakan kepada informan. Yang digunakan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan sudah ditentukan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dikemukakan oleh Moleong (2004:161) bahwa dokumentasi adalah setiap bahan yang berhubungan dengan tulisan atau film. Jadi teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat ataupun catatan serta buku yang berisi data dan laporan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan daerah, surat keputusan, surat

edaran/junkis yang di anggap relevan dengan obyek penelitian.

6. Instrumen/Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif instrumen adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun sendiri kelangan, baik pada *grand tour question*, tahap *focus and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono 2014, 223). Dalam pelaksanaan penelitian, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan beberapa alat bantu, antara lain:

a. Panduan Wawancara

Panduan wawancara berisi catatan mengenai data yang akan dikumpulkan peneliti dan daftar pertanyaan utama untuk membantu peneliti dalam melakukan wawancara. Dengan adanya panduan ini, akan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap topik yang dibicarakan saat wawancara.

b. Panduan Observasi

Panduan observasi atau *check list* diperlukan peneliti untuk mencatat hal-hal yang ditemui selama penelitian. Panduan ini juga berguna bagi peneliti untuk mendeskripsikan hasil temuan.

c. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *handphone*, yang dilengkapi dengan fitur kamera dan perekam suara. Dengan bantuan alat dokumentasi tersebut, peneliti dapat melakukan pengambilan gambar atau objek yang diamati dan melakukan perekaman suara saat pelaksanaan wawancara.

5. Analisis Data

a. Keabsahan Data

Agar dapat diperoleh dalam penelitian ini valid dan kredibel, maka diperlukan teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data ini dilakukan menggunakan uji kredibilitas yang menggunakan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data,

dan triangulasi waktu (Sugiyono 2014:273).

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber tersebut diambil dari atasan, bawahan, dan teman.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, dan kuisioner.

3. Triangulasi Waktu

Sering juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

b. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data adalah teknik analisis data Huberman dan Miles dalam Sugiyono (2014:91), analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:404) seperti yang dibawah ini:

1. Reduksi Data

Maksudnya ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan/*Verification*

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Hilir Kantor. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah menengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihakterkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin

konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut. Komunikasi didalam implementasi suatu program merupakan hal yang penting. Dalam meneruskan pesan kebawah dalam suatu organisasi atau ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud kebijakan.

2. Sumberdaya dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud

adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya implementasi program keluarga harapan di desa hilir kantor.

3. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang sangat penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Menurut Edward III dalam Winarno kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para

pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

4. Struktur birokrasi berkenaan dengan SOP atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Komunikasi

Setelah melakukan penelitian bahwa komunikasi dalam implementasi program keluarga harapan di Desa Hilir Kantor masih belum maksimal. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduk sehingga informasi tentang

program keluarga harapan sampai ke pelosok pelosok desa.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang utama dalam implementasi program adalah sumber daya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya, yang mana tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dengan adanya sumber daya manusia (staf) yang berkualitas maka tidak menuntut kemungkinan implementasi PKH akan berjalan sesuai harapan, maka dari itu sumberdaya manusia perlu ditingkatkan lagi.

c. Disposisi

Implementasi akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya apabila sikap atau perspektif yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan pembuat kebijakan maka proses implementasi PKH tidak dapat berjalan sesuai harapan.

d.Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa masih terkendala dalam dalam aspek fragmentasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik itu masyarakat yang menjadi sasaran bantuan belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur-prosedur kerja yang ada atau belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).



F. REFERENSI

Permensos Nomor 1 Tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan.

Buku-buku

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung ALFABETA.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi*. Yogyakarta: Media Presindo

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dewanti, Ajeng Kusuma. 2012. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Tim Penyusun. 2017. *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi. FISIP UNTAN Pontianak*.

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.